



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN TEKNIS Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah



2010

PEDOMAN TEKNIS

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I:	
PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Landasan Hukum	3
E. Pengertian	3
BAB II	
KONSEP GENDER, PENGARUSUTAMAAN GENDER, TUJUAN PPRG DAN KATEGORI ARG	7
A. Konsep Gender	7
B. Pengarusutamaan Gender	8
C. Tujuan PPRG, Prinsip dan Kategori ARG	9
BAB III	
DATA TERPILAH DAN INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATOR RESPONSIF GENDER	11
A. Pengertian Data Terpilah	11
B. Manfaat Data	12
C. Indikator Kinerja	13

D. Indikator Responsif Gender.....	14
BAB IV	
SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG	
DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA	
A. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	15
B. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah	17
C. Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Berbasis Kinerja	18
BAB V :	
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PPRG DI DAERAH	
A. Penyusunan GAP	21
B. Penyusunan GBS	23
C. Penyusunan TOR/KAK	24
D. Keterkaitan GAP, GBS dengan TOR dan RKA/DPA.....	26
BAB VI :	
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPRG DI DAERAH	
A. Pemantauan	27
B. Evaluasi	30
C. Pelaporan	31
BAB VII :	
PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM Indonesia merupakan salah satu keberhasilan dari Pembangunan Nasional. Peningkatan kualitas SDM yang disesuaikan dengan keberagaman aspirasi masyarakat akan dapat mendukung percepatan keberhasilan pembangunan.

Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanahkan bagi semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat menyusun kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing bidang pembangunan. Secara spesifik diamanahkan pula dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi memandang penting untuk menyusun **“Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah”**, yang ditujukan untuk menyamakan persepsi bagi aparat pemerintah daerah serta dapat digunakan sebagai rujukan operasional teknis bagi komponen perencana SKPD untuk membuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang responsif gender dengan pendekatan sistem penganggaran berbasis kinerja.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan suatu proses yang perlu dilaksanakan oleh para perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai wujud adanya komitmen para pengambil keputusan, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Disadari bahwa Panduan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Daerah ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan sangat kami harapkan. Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam Penyusunan Panduan ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Harapan kami, semoga panduan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Jakarta, Desember 2010
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender
Bidang Ekonomi



Dr. Ir. Hertomo Heroe, MM

TIM PENYUSUN

Pengarah

Primacon Cipta Mandiri : Rinusu
Jamarrudin
Enny Febriana

Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak : Dr. Ir. Hertomo Heroe, MM

Kontributor:

Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak : 1. Siti Khadijah Nasution
2. Endah Prihatiningtyastuti
3. Valentina Ginting
4. Zamzam Muchtaram
5. Dra. Sunarti, Msi
6. Dwiyono
7. Sri Lestari
8. Nani Dwi Wahyuni
9. Bayu Harie Nugroho.
10. Lita Susilowati

Desain : INTERAXI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara konseptual Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan bagian dari pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*). Harus dipahami bahwa PPRG bukanlah merupakan suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, namun PPRG merupakan alat dan bukan tujuan. Dalam penyusunan PPRG dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Penyusunan PPRG wajib mendasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja yang dikenal singkatan 3E, yaitu Ekonomis, Efisien Dan Efektif serta menambahkan prinsip Equity (E). Teknis penyusunan PPRG di daerah dapat dilakukan melalui (1) analisis gender dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP), (2) penyusunan *Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender* (GBS/PAG) dan (3) mengintegrasikan hasil GAP, GBS dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Anggaran Responsif Gender (ARG) terbagi dalam 3 kategori yaitu : (1) anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki, (2) anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender, (3) anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk membuka cakrawala pemikiran baru, dan sebagai acuan para perencana SKPD pada instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, diharapkan para perencana pada unit organisasi dapat mengembangkan indikator kinerja responsif gender dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

BAB I

Pendahuluan

A. Umum

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, menetapkan 3 (tiga) prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan (3) pengarusutamaan gender (PUG). Ketiga prinsip tersebut menjadi jiwa dan landasan operasional bagi keseluruhan pembangunan nasional. Selain itu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, secara tegas menyatakan kewajiban untuk menyusun program yang prorakyat, berkeadilan untuk semua, dan mencapai tujuan pembangunan millennium.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, tetapi lebih merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah. Hal penting pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah mewajibkan untuk menggunakan analisis gender dalam menyusun kebijakan strategis dan kebijakan operasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender. Dan Pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam rangka menyusun kerangka studi dan instrumen analisis harus mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan analisis gender.

Selain peraturan itu, Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender. Penyusunan itu dilakukan melalui proses perencanaan pembangunan yang menggunakan perspektif gender dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Renja SKPD. Secara jelas pasal 4 Ayat 2 Permendagri ini juga menyebutkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan harus dilakukan melalui analisis gender. Walaupun kedua peraturan tersebut telah menegaskan pentingnya analisis gender dalam menyusun dokumen perencanaan

pembangunan daerah, namun permasalahannya adalah para perencana SKPD belum memahami secara teknis cara menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Mengingat PPRG merupakan hal baru bagi para perencana SKPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, maka secara teknis operasional dibutuhkan sebuah pedoman teknis tatacara penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan, maka pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun dan mengimplementasikan PPRG dalam upaya memberikan jawaban untuk mengatasi kesenjangan gender dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

B. Tujuan dan Sasaran

Pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman untuk para perencana setiap SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender.
2. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk memasukan analisis gender dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
3. Memberikan alat bantu bagi daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Sasaran dari pedoman PPRG ini adalah:

1. Para perencana SKPD pada setiap instansi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender di daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penyusunan program dan kegiatan dengan menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP), Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG) dan penyusunan kerangka acuan kegiatan.
2. Langkah-langkah analisis gender, penyusunan GBS/PAG dan penerapannya dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).

3. Penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam RKA/DPA.
4. Mekanisme pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, dan penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2011

E. Pengertian

1. **Gender** adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah. Selain itu, gender diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda di setiap tempat dan waktu.
2. **Responsif gender** adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
3. **Sensitif gender** adalah pola pikir, sikap, dan tingkah laku serta pengambilan keputusan yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.

4. **Pengarusutamaan Gender (PUG)** adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan nasional.
5. **Anggaran Responsif Gender (ARG)** adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
6. **Gender Budget Statement (GBS)** atau **Pernyataan Anggaran Gender (PAG)** adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
7. **Kesetaraan gender** adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. **Analisis gender** adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
9. **Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*)** adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan, atau anak laki-laki dan perempuan.
10. **Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)** merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
12. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah**, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada RKP Nasional, memuat kerangka ekonomi Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. **Pagu indikatif** merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.

14. **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)** adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran bagi SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
15. **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)** adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)** adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. **Kinerja** adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. **Indikator kinerja** adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. **Program** adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
21. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. **Keluaran (*output*)** adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
23. **Hasil (*outcome*)** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
24. **Indikator** adalah kriteria atau ukuran yang mampu melihat perubahan dari obyek yang dinilai. Indikator dapat berupa pointer-pointer, angka-angka, pendapat atau persepsi-persepsi .
25. **Indikator gender** adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
26. **Indikator kinerja responsif gender** adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan.
27. **Jenis kelamin** adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.

28. **Kesenjangan gender** adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
29. **Akses** adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, maupun waktu)
30. **Kontrol** adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
31. **Partisipasi** adalah pelibatan atau keterwakilan dalam proses dari suatu kegiatan.
32. **Penerima manfaat** adalah target sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
33. **Pemantauan (*monitoring*)** suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Bila dalam proses ini ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
34. **Penilaian (*evaluation*)** suatu kegiatan, dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi diarahkan untuk membandingkan antara yang seharusnya dengan realita, yang dapat dilihat dari indikator *input*, *output*, *outcome*, dan dampak.



BAB II

Konsep Gender, Pengarusutamaan Gender, Tujuan PPRG dan Kategori ARG

A. Konsep Gender

Konsep gender dan jenis kelamin (*sex*) merupakan dua konsep yang berbeda namun sama-sama menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Pengertian jenis kelamin (*sex*) merujuk pada perbedaan atribut fisik laki-laki dan perempuan seperti perbedaan kromosom, alat kelamin, dan reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi serta perbedaan karakteristik fisik sekunder seperti rambut, pertumbuhan buah dada, perubahan suara, dan seterusnya. Konsep jenis kelamin menjelaskan mengenai kodrat Tuhan yang telah memberikan ciri fisik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kodrat fisik tersebut tidak dapat dipertukarkan dan dimiliki sama oleh laki-laki dan perempuan di seluruh tempat dan budaya, serta dimiliki sejak lahir hingga meninggal dunia. Perbedaan jenis kelamin (*sex*) dalam masyarakat memberikan konsekuensi makna sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan konsep gender merupakan hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah, serta dapat dialihkan dan dipertukarkan dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya menurut waktu, tempat dan budaya setempat. Konsep gender diciptakan oleh keluarga dan atau masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya, interpretasi pemuka agama, dan diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Perbedaan peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan menghasilkan perbedaan gender. Peran gender mempengaruhi pola relasi antara perempuan dan laki-laki yang disebut sebagai relasi gender.

Perbedaan antara konsep gender dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1: Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

Jenis Kelamin	Gender
Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi.	Menyangkut pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil konstruksi (bentukan) masyarakat
Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya.	Peran sosial dapat berubah: Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi peran pencari nafkah
Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: Tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.	Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri.
Peran reproduksi berlaku sepanjang masa	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan
Peran reproduksi berlaku di mana saja.	Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu.
Peran reproduksi berlaku bagi semua kelas/strata sosial.	Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan kelas/strata sosial lainnya.
Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau bersifat kodrati.	Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati

B. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.

C. Tujuan PPRG, Prinsip dan Kategori ARG

1. Tujuan PPRG

Penyusunan PPRG mempunyai tujuan, yaitu:

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
- Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran.

2. Prinsip-Prinsip ARG yaitu :

- ARG pada penganggaran diletakan pada output kegiatan. Relevansinya adalah komponen input, dan output kegiatan yang akan dihasilkan harus jelas dan terukur.
- Kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus ARG.
- ARG yang diterapkan untuk menghasilkan output kegiatan, yaitu: (i) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah, (ii) Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*), dan/atau (iii) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang di dalamnya termasuk *capacity building*, advokasi gender, kajian sosialisasi, desiminasi, dan/atau pengumpulan data terpilah.
- ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
- ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk PUG, tetapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

3. Kategori ARG

Anggaran responsif gender dibagi atas **3 kategori**, yaitu:

- (a) **Anggaran khusus target gender**, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.

- (b) **Anggaran kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan.
- (c) **Anggaran pelembagaan kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun *capacity building*.



BAB III

Data Terpilah, Indikator Kinerja dan Indikator Responsif Gender

A. Pengertian Data Terpilah

Secara sederhana data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan. Dalam konteks penerapan PPRG di daerah, data terpilah menurut jenis kelamin dan gender statistik sangat diperlukan untuk memformulasikan kebijakan pembangunan. Pengertian data terpilah menurut jenis kelamin adalah data yang dipilah menurut kelompok laki-laki dan perempuan, sedangkan gender statistik adalah data terpilah menurut jenis kelamin yang menunjukkan isu gender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif dan bisa pula kualitatif. Dengan memfaktakan data terpilah dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dapat diketahui posisi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Umumnya data dikaitkan dengan tempat dan waktu, penyebutan tempat dan waktu menjadi satu hal yang penting, sebab data akan berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan juga berbeda menurut tempatnya (contohnya lihat lampiran). Terdapat beberapa jenis data, sebagai berikut :

1. Jenis data menurut sumber dapat dibedakan atas data internal dan data eksternal. Data internal menunjukkan data yang bersumber dari internal (SKPD), sedangkan data eksternal berarti data yang bersumber dari pihak luar (diluar SKPD). Cara untuk mendapatkan data tersebut dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun, disusun, diolah, dan disajikan sendiri oleh lembaga yang membuat data. Umumnya data primer berisikan data yang sifatnya spesifik tentang suatu masalah, sementara data sekunder berisikan data yang sifatnya umum (makro) tentang suatu masalah.
2. Jenis data menurut waktu. Pengumpulan data atas dasar perspektif waktu dapat dibedakan menjadi data runtun waktu (*time series*) dan data lintas tempat (*cross section*). Data runtun waktu dapat disebut pula sebagai data historis menurut cakupan waktu. Data runtun waktu bisa berwujud ke dalam satuan tahun, kuartal, bulan, minggu, hari, atau ukuran waktu yang lebih kecil. Data lintas tempat sebagai data mengenai banyak obyek dengan satu unit waktu. Banyak obyek bisa berisikan dimensi tempat.

3. Jenis data menurut bentuknya. Data menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang mencatat fakta yang diwujudkan dalam angka/ numerik. Sedangkan data kualitatif adalah data yang merekam fakta bukan dalam bentuk angka/ numerik melainkan dalam bentuk kategori yang sifatnya lebih deskriptif. Pencatatan data kuantitatif biasanya menggunakan standar pengukuran yang tetap dan lebih pasti, sedangkan pencatatan data kualitatif menggunakan standar yang lebih fleksibel dan bahkan lebih subyektif.

B. Manfaat Data Terpilah

Manfaat data yang sifatnya terpisah menurut jenis kelamin maupun yang belum pada dasarnya adalah untuk membuat keputusan bagi para pembuat keputusan (*decision makers*). Manfaat data dalam konteks pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah sebagai prasyarat bagi pembuat keputusan untuk perumusan kebijakan, program, dan kegiatan, selain itu data dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi kinerja. Dengan data yang dikumpulkan setiap SKPD, dapat diketahui kinerja daerah atau membandingkan hasil capaian kinerja dari pelaksanaan PUG. Adapun manfaat dari data terpisah adalah :

1. Mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan atas pelaksanaan PUG.
2. Menjelaskan perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki.
3. Sebagai alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Uraian data terpisah di atas dapat dikelompokkan berdasarkan sumber datanya, jenis data, dan manfaat data, melalui tabel 2, berikut ini:

Tabel 2: Pengelompokan Data

No	Dasar Klasifikasi Data Terpilah		Uraian
1	Sumber Data	Data Primer	Secara langsung diambil dari obyek/obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi.
		Data Sekunder	Data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun nonkomersial.

No	Dasar Klasifikasi Data Terpilah		Uraian
2	Jenis Data	Data Kuantitatif	Data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya jumlah pegawai perempuan dan laki-laki menurut jenis pendidikan yang ditamatkan.
		Data Kualitatif	Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna.
3	Pemanfaatannya	Data Dasar	Data yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan umumnya dikumpulkan oleh BPS, PBB, Bappenas.
		Data Sektor	Data yang pemanfaatannya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sektor.
		Data Khusus	Data yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk kepentingan spesifik seperti dunia usaha dan lainya.

Sumber: Panduan Pelatihan PUG Kementerian Keuangan, 2010, hal 30

C. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur. Ada 6 jenis indikator, yaitu:

1. Indikator kinerja *input* (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, kebijakan, dan lain-lain.
1. Indikator kinerja proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*ouput*).
2. Indikator kinerja *output* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik.
3. Indikator kinerja *outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator kinerja manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator kinerja dampak (*impact*) adalah pengaruh yang di timbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah di tetapkan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator kinerja adalah:

1. Spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Relevan, kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.

4. Dapat dicapai, artinya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
5. Fleksibel dan sensitif, terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan.
6. Efektif, data dan informasi berkaitan dengan indikator kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

D. Indikator Responsif Gender

Indikator responsif gender atau *Gender-sensitive indicator* mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan gender dalam pembangunan. Indikator-indikator ini harus mampu menunjukkan perubahan-perubahan status dan peranan perempuan dan laki-laki. Dengan menggunakan indikator responsif gender dalam suatu program akan membantu membuat perencanaan yang lebih efektif, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik. Indikator responsif gender atau indikator sensitif gender mampu menangkap perubahan yang terkait dengan gender sepanjang waktu tertentu. Indikator responsif gender ini menyajikan suatu keadaan yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan dan menunjukkan hubungan gender yang tidak setara. Indikator responsif gender tidak berarti membuat indikator yang baru, tetapi hanya menjelaskan lebih rinci siapa penerima manfaat program dan kegiatan bagi laki-laki maupun perempuan. Pada bagian lampiran 8 dan lampiran 9 dicantumkan contoh data terpilah menurut jenis kelamin, cara merumuskan indikator output dan tolok ukur kinerja yang responsif gender menurut urusan wajib dan pilihan.

BAB IV

Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran dan Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

A. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Skema dibawah ini menjelaskan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran:

Diagram 4.1: Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

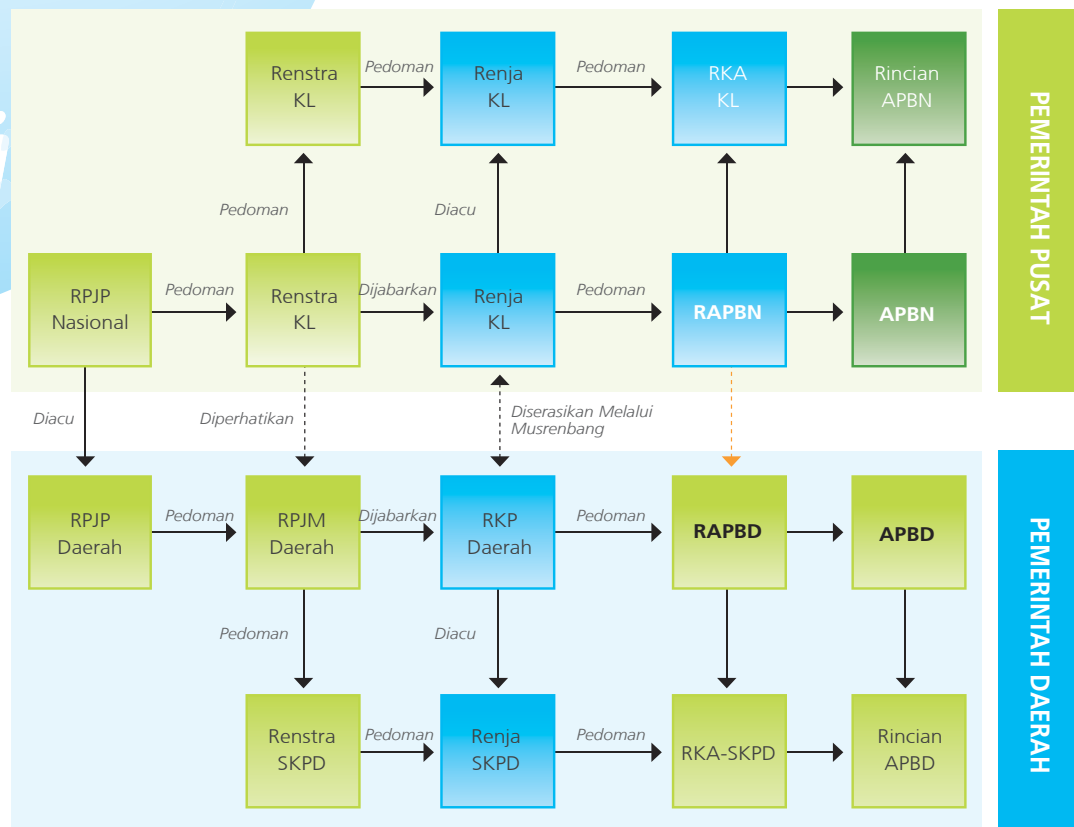


Diagram 4.1 menggambarkan keterkaitan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Penyusunan dokumen perencanaan strategis yang digambarkan diatas merupakan bagian penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan rencana-rencana dan target-tagert yang ingin dicapai, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan penganggaran yang menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah harus mengacu, memperhatikan dan mempedomani dokumen perencanaan dan penganggaran nasional. Dokumen RPJMD yang disusun daerah akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja). Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan di level daerah dengan di level SKPD, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, dan RKPD akan diacu dalam penyusunan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top-down*, yang dijelaskan sebagai berikut:

Diagram 4.2: Pendekatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah



B. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.

Diagram 4.3: Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

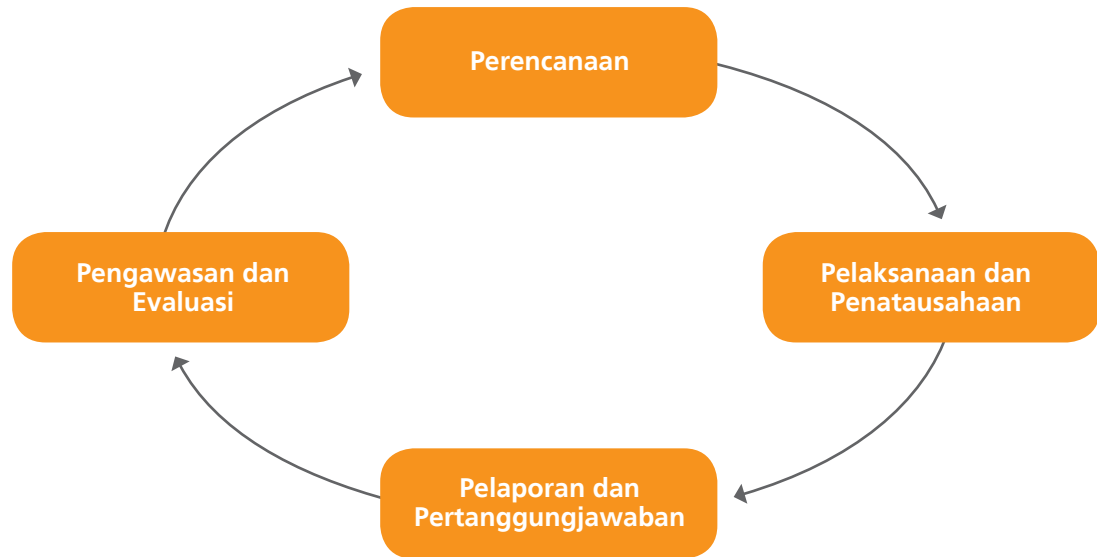


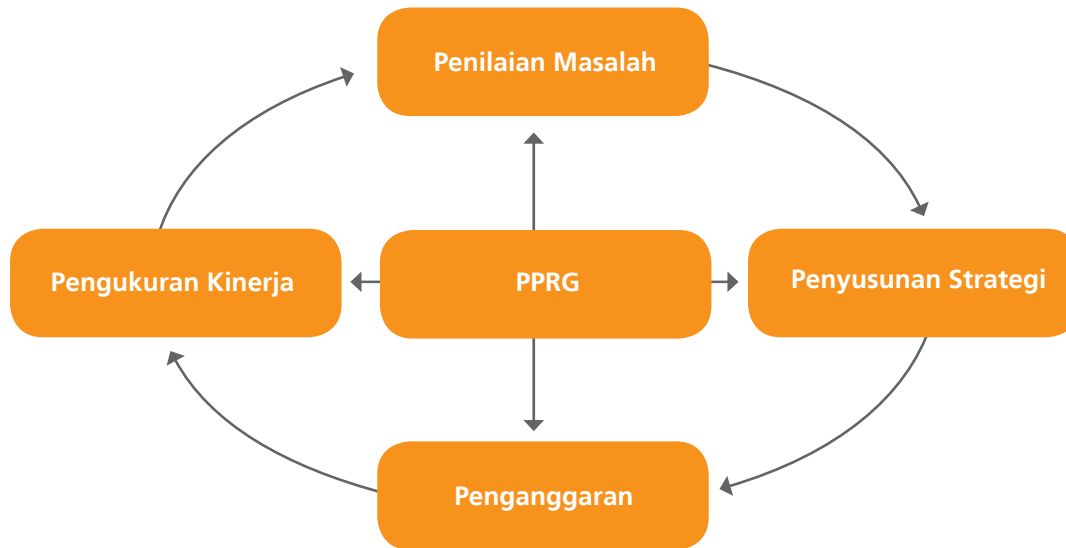
Diagram 4.3 menjelaskan tentang siklus pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui 4 tahapan yaitu:

- 1. Perencanaan.** Penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah mulai dari menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang ada dalam dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA dan PPAS, dan RKA SKPD hingga penjabaran APBD dan DPA.
- 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan.** Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKA dan DPA SKPD harus dilaksanakan seluruh SKPD dan dilakukan penatausahaan.
- 3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.** Pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai DPA dilaporkan dan dipertanggungjawabkan hasilnya setelah dilakukan pemeriksaan.
- 4. Pengawasan dan Evaluasi.** Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD.

C. Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

Kerangka perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian subsistem dari pendekatan manajemen berbasis kinerja. Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran kinerja diuraikan melalui Diagram 4.4.

Diagram 4.3: Kerangka PPRG Dalam Proses Penyusunan Anggaran Kinerja



Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 tahapan:

1. Penilaian masalah. Melakukan identifikasi permasalahan dan isu-isu yang dihadapi masyarakat dan pemerintah (isu-isu strategis), melakukan analisis untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, kesempatan, dan tantangan eksternal serta membuat skala prioritas.
2. Penyusunan strategi. Mengembangkan strategi, yaitu menyusun program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan berdasarkan hasil analisis.
3. Penganggaran. Menyiapkan anggaran (alokasi sumber daya) dengan mempertimbangkan prinsip anggaran kinerja, menyusun rincian anggaran atau sumber daya yang dibutuhkan setiap jenis program dan kegiatan.
4. Pengukuran kinerja. Mengidentifikasi ukuran kinerja untuk memonitor efektivitas kegiatan dan kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melakukan analisis, apakah program dan kegiatan memenuhi

tuntutan masyarakat, jika tidak, maka program dan kegiatan dapat direvisi atau dievaluasi untuk keberlanjutan program.

Sistem anggaran berbasis kinerja menekankan pada perumusan indikator kinerja *output* dan *outcome*. Untuk memahami apa dan bagaimana posisi indikator kinerja dalam manajemen berbasis hasil, terdapat pada Diagram 4.5



Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Bappenas, 2009, bappenas.go.id

Diagram 4.5. menggambarkan apa yang ingin diubah dengan hasil dan keluaran. Untuk menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan input atau sumber daya yang digunakan.

BAB V

Langkah-langkah Penyusunan PPRG di Daerah

A. Penyusunan GAP

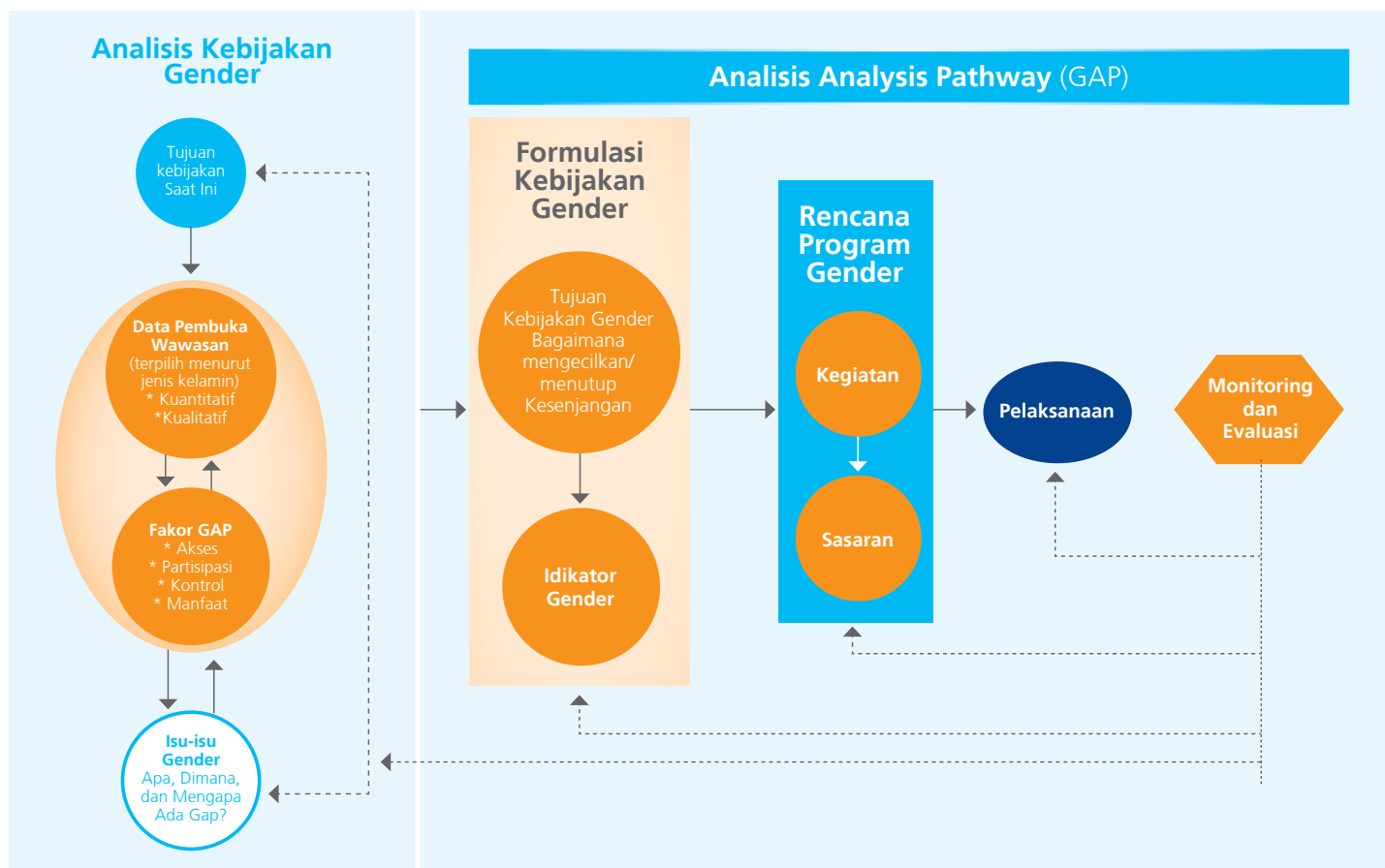
Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan salah satu alat analisis gender. GAP didasarkan pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun. Metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah yaitu:

Tabel 3: Metode GAP

Langkah-langkah GAP	Penjelasan
1. Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan Dianalisis	- Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis. - Menuliskan tujuan kebijakan/program/ kegiatan.
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan	- Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin. - Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender	Menemukanali dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).
4. Menemukanali Sebab Kesenjangan Internal	Temukanali isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukanali Sebab Kesenjangan Eksternal	Temukanali isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya <i>patriakhi</i>, <i>gender stereotype</i> (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga).
6. Reformulasi Tujuan	Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/kegiatan supaya responsif gender.

Langkah-langkah GAP	Penjelasan
7. Rencana Aksi	- Menetapkan rencana aksi. - Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4 dan 5.
8. Data Dasar	- Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress) - Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan.
9. Indikator Gender	Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

Alur kerja GAP di uraikan melalui diagram 4.6, berikut ini :



B. Penyusunan GBS

Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam menyusun GBS/PAG dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4: Komponen GBS

Komponen GBS	Uraian	
Program	Nama program SKPD (sesuai dengan Renstra)	
Kegiatan	Nama kegiatan SKPD (sesuai dengan Renja SKPD).	
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja SKPD (Tujuan yang ada pada langkah 1 GAP).	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja SKPD.	
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah 2,3,4, langkah 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan langkah 6 pada GAP.	
Rencana Aksi (langkah 7 GAP yang dirinci menjadi subkegiatan/ tahapan kegiatan)	Kegiatan/ Subkegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP
		Subkegiatan 1 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Subkegiatan 2 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sukegiatan 3 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Subkegiatan 4 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Subkegiatan 5 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Output ¹ Output kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan SKPD.
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan (Rp...)
	SDM	-
	Peralatan dan Mesin	-
Dampak/ Hasil Output kegiatan	Dampak/hasil dari output kegiatan yang dihasilkan untuk pencapai outcome program SKPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.	

C. Penyusunan TOR/KAK

Term of reference (TOR) atau kerangka acuan kegiatan (KAK) diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya. TOR/KAK merupakan dokumen yang menerangkan segala sesuatu tentang rencana pelaksanaan suatu kegiatan. Ada 5 (lima) komponen yang penting diperhatikan dalam menyusun TOR yaitu:

1. Latar Belakang

Latar belakang menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar keberadaan kegiatan. Uraian gambaran umum menjelaskan secara singkat mengapa suatu aktivitas dilaksanakan, alasan-alasan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan.

2. Penerima Manfaat

Sasaran kegiatan yang dilaksanakan harus jelas siapa yang menjadi penerima manfaat. Uraian siapa yang menjadi penerima manfaat program/kegiatan.

3. Strategi Pencapaian keluaran

Strategi pencapaian keluaran menjelaskan tentang (i) Metode pelaksanaan, cara pelaksanaan, misalnya apakah berupa kontraktual atau swakelola, (ii) Tahapan dan waktu pelaksanaan. Tahapan atau komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran diuraikan secara jelas, misalnya jadwal, waktu pelaksanaan, dan keterangan kelanjutan pelaksanaan kegiatan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian output kegiatan adalah menerangkan waktu untuk pencapaian output kegiatan yang direncanakan.

5. Biaya Yang Diperlukan

Menyusun perkiraan biaya atau jumlah anggaran untuk mencapai keluaran kegiatan. Biaya merupakan total anggaran kegiatan yaitu sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB). Penyusunan TOR/KAK untuk daerah belum ada format yang baku sesuai dengan regulasi. Namun, untuk menyusun TOR/KAK biasanya mencakup beberapa hal yaitu:

Program		: diisi nama program
Sasaran program		: apakah yang menjadi tujuan program
Kegiatan		: diisi nama kegiatan
Latar Belakang	Dasar Hukum	: dasar hukum terkait dengan program/kegiatan
	Gambaran Umum	: gambaran situasi persoalan di daerah yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	: rincian kegiatan atau aktivitas
	Indikator Kinerja	: indikator untuk menilai keberhasilan sebuah kegiatan
	Batasan Kegiatan	:
Maksud dan tujuan		: tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan
Cara pelaksanaan kegiatan		: metode pelaksanaan kegiatan
Tempat pelaksanaan kegiatan		: lokasi pelaksanaan kegiatan
Pelaksana & penanggung-jawab kegiatan		: pihak/aparat yang menjadi pelaksana dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
Jadwal		: waktu pelaksanaan
Biaya		: kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan

Sumber: Modul Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, disusun GTZ dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, 2010

C. Keterkaitan GAP, GBS Dengan TOR dan RKA/DPA

Berkenaan dengan hasil analisis GAP, GBS, dan cara aplikasinya dalam penyusunan TOR dan RKA dijelaskan pada tabel 4 berikut:

Tabel 5: Keterkaitan GAP, GBS Dengan TOR dan RKA

GAP	GBS/PAG	TOR/KAK	RKA/DPA
Langkah 2	Data terpilah disajikan dalam analisis situasi	Data terpilah yang mengandung isu gender dan relevan disajikan dalam TOR	Program dalam RKA harus sesuai dengan nama program yang ada pada GBS (Sesuai Renstra/Renja SKPD)
Langkah 3,4, dan 5	Uraian langkah 2,3,4, dan 5 GAP disajikan disajikan kembali pada analisis situasi	Deskripsi kesenjangan gender menjadi tambahan bagian latar belakang dalam TOR (ambil analisis situasi pada GBS)	
Langkah 6	Tujuan mengacu pada reformulasi tujuan langkah 6 GAP	Tujuan pada TOR dapat mengambil reformulasi tujuan langkah 6 GAP	Kelompok sasaran dalam RKA ditentukan berdasarkan hasil analisis GAP dan GBS atau yang ada dalam TOR
Langkah 7	Komponen kegiatan/ subkegiatan (aktivitas) mengacu Renja SKPD	Komponen kegiatan/ subkegiatan dalam TOR mengacu Renja SKPD	Kegiatan dalam RKA harus sesuai dengan GBS (sesuai Renja SKPD)
Langkah 8	<i>Output</i> pada GBS mengacu tujuan kegiatan	Tentukan komponen subkegiatan yang mendukung pencapaian kinerja <i>output</i> kegiatan	Rumusan <i>output</i> dalam RKA dapat mengambil dari <i>output</i> kegiatan pada GBS
Langkah 9	Dampak/hasil mengacu pada langkah 9 GAP	Rumusan sasaran penerima manfaat dalam TOR dapat menggunakan analisis tujuan, rumusan <i>output/outcome</i> pada GBS	Rumusan <i>outcome</i> dalam RKA dapat mengambil rumusan indikator gender pada GAP atau indikator hasil pada GBS

Tabel 4 diatas menjelaskan keterkaitan GAP, GBS dengan penyusunan TOR/KAK dan RKA/DPA. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah hasil GAP dan GBS yang selanjutnya dokumen tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

BAB VI

Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah¹

A. Pemantauan

Pemantauan dan evaluasi difokuskan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Secara spesifik tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah :

1. Mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan RKA/DPA SKPD.
4. Memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan GBS, TOR/KAK dan aplikasinya dalam RKA/DPA.
5. Memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan mengukur kemajuan-kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Pemantauan Tahap Perencanaan

Fokus pemantauan tahap perencanaan meliputi dokumen (1) penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS), (2) penyusunan *Term of Reference* (TOR), dan (3) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

¹ Pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi PPRG dapat dilakukan oleh Badam/Biro Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Bappeda Bidang Sosial dan Budaya atau bagian Pemantauan dan evaluasi program.

Formulir 1¹. Cheklist Pemantauan Tahap Perencanaan

Unit Organisasi	Program/ kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan (Contoh)		1. Apakah penyusun program/ kegiatan menggunakan data terpilah?			
		2. Apakah penyusunan program/ kegiatan menggunakan analisis gender?			
		3. Apakah hasil GAP dijadikan acuan dalam penyusunan GBS?			
		4. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun TOR/KAK?			
		5. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan TOR/KAK?			
		6. Apakah kegiatan/subkegiatan dalam RKA/DPA menjawab isu kesenjangan gender?			
		7. Apakah jumlah input anggaran dan input lainnya yang ada pada TOR dan RKA/DPA rasional?			
		8. Apakah tujuan kegiatan dalam TOR/KAK berhubungan dengan hasil pada RKA/DPA?			
		9. Apakah keluaran dan hasil dirumuskan secara jelas dan terukur?			
		10. Apakah keluaran dan hasil dalam RKA secara jelas akan memberi manfaat pada laki-laki dan perempuan?			

¹ Kolom 1. Isi dengan unit organisasi

Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja SKPD

Kolom 4. Bubuhkan tanda (✓) jika anda menjawab "YA" (nilainya 1)

Kolom 5. Bubuhkan Tanda (✓) jika anda menjawab "TIDAK" (nilainya 0)

Kolom 6. Isi dengan tanggapan Anda jika belum memberi jawaban "YA" atau "TIDAK"

2. Pemantauan Tahap Pelaksanaan

Fokus pemantauan tahap pelaksanaan adalah proses dan hasil yang dicapai dari setiap program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen RKA SKPD/DPA.

Formulir 2². Cheklist Pemantauan Tahap Pelaksanaan

Unit Organisasi	Program/ kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan (Contoh)		1. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan sudah sesuai dengan masukan RKA/DPA SKPD?			
		2. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran dalam RKA?			
		3. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan sudah sesuai dengan target hasil dalam RKA/DPA?			
		4. Apakah proses pelaksanaan program/kegiatan mengalami hambatan?			
		5. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran dalam RKA/DPA?			
		6. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan melibatkan laki-laki dan perempuan?			
		7. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan memberi hasil dan manfaat pada laki-laki, perempuan?			

² Kolom 1. Isi dengan unit organisasi
Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja SKPD
Kolom 4. Bubuhkan tanda (✓) jika anda menjawab “YA” (nilainya 1)
Kolom 5. Bubuhkan Tanda (✓) jika anda menjawab “TIDAK” (nilainya 0)
Kolom 6. Isi dengan tanggapan Anda jika belum memberi jawaban “YA” atau “TIDAK”

3. Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban

Fokus pemantauan tahap pertanggungjawaban meliputi dokumen laporan pelaksanaan program dan kegiatan, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Teknisnya dilakukan dengan cara membandingkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan rencana yang telah menerapkan analisis gender, menyusun GBS, dan menerapkannya dalam RKA/DPA.

Formulir 3³. Cheklist Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban

Unit Organisasi	Program/ kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan (Contoh)		1. Apakah hasil program/kegiatan sudah sesuai dengan tujuan dan target dalam DPA?			
		2. Apakah hasil program/kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran dalam DPA?			
		3. Apakah ada manfaat program/ kegiatan bagi laki-laki dan perempuan?			
		4. Apakah laporan program dan kegiatan dalam LAKIP jelas dan terukur ?			
		5. Apakah hasil dan manfaat program/kegiatan telah mengurangi kesenjangan gender?			
		6. Apakah jumlah anggaran memberikan manfaat dan mengatasi kesenjangan gender?			

³ Kolom 1. Isi dengan unit organisasi
Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja SKPD
Kolom 4. Bubuhkan tanda (✓) jika anda menjawab “YA” (nilainya 1)
Kolom 5. Bubuhkan Tanda (✓) jika anda menjawab “TIDAK” (nilainya 0)
Kolom 6. Isi dengan tanggapan Anda jika belum memberi jawaban “YA” atau “TIDAK”

B. Evaluasi

Evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator yang ada. Untuk penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Untuk melakukan penilaian didasarkan dengan hasil pengisian formulir 1, 2, dan 3 yang direkap dengan menggunakan formulir dibawah ini:

Formulir 4⁴ . Evaluasi PPRG di Daerah

Komponen evaluasi	Total score yang ideal (a)	Total score yang dicapai (b)	% score yang dicapai terhadap score ideal (c = b/23 x100)
1	2	3	4
1.Perencanaan	10		
2.Pelaksanaan	7		
3.Pertanggungjawaban	6		
Jumlah nilai kumulatif	23		

Evaluasi dilakukan dengan cara perbandingan total skor yang dicapai (b) dengan total skor yang ideal (a) dikalikan angka 100 %, yang diperoleh adalah jumlah nilai kumulatif. Untuk menentukan apakah program dan kegiatan telah responsif gender dan digunakan kriteria berikut :

Formulir 5. Skala dan Kriteria Penilaian

Skala	Kriteria Penilaian
80 - 100	Responsif gender
60 - 79	Kurang responsif gender
< 60	Belum responsif gender

⁴ Kolom 2. Isi dengan jumlah pertanyaan
Kolom 3. Isi dengan skor yang dicapai dari hasil formulir 1, 2, dan 3
Kolom 4. Isi dengan total skor yang dicapai dibagi dengan total pertanyaan dikali 100

Untuk memberi kesimpulan didasarkan pada kriteria penilaian, yaitu:

1. Jika skor yang dicapai berada pada skala 80 - 100, dikatakan responsif gender.
2. Jika skor yang dicapai berada pada skala 60 - 79, dikatakan kurang responsif gender.
3. Jika skor yang dicapai kurang dari (<) 60, dikatakan belum responsif gender.

C. Pelaporan

Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG. Hasil evaluasi ini menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

Penutup

Pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran ditandai dengan analisis gender, penyusunan GBS dan aplikasi GAP, GBS dalam TOR/KAK dan RKA/DPA SKPD. Harus dipahami bahwa PPRG tidak hanya difokuskan pada tahap penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, namun merupakan proses penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang wajib mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Penyusunan PPRG dapat diawali dengan metode *gender analysis pathway* (GAP) atau dengan metode lain, menyusun GBS, menerapkan hasil GAP dan GBS ke dalam TOR/KAK dan RKA/DPA SKPD. Faktor penting penyusunan PPRG adalah ketersediaan data terpilah dan isu-isu gender. Pedoman ini disusun dengan tujuan mempermudah dan membantu para perencana SKPD agar tidak mengalami kesulitan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang responsif gender dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja.

Pedoman ini diharapkan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan perspektif gender dalam menyusun laporan akuntabilitas kerjanya. Selain itu perlu diintegrasikan ke dalam laporan pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota. Oleh karena itu dalam laporannya perlu dilengkapi dengan capaian kinerja yang menunjukkan adanya manfaat secara adil bagi laki-laki dan perempuan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya atas segala rencana dan upaya menjalankan tugas keseharian kita, dan dalam mewujudkan kinerja yang lebih tepat sasaran serta bermanfaat bagi kelompok laki-laki dan perempuan dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Materi Presentasi

Ahmad Junaidi, Materi Workshop Pembangunan yang Berbasis Gender di Indonesia, 2009

Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender, Cetakan ke-4, BKKBN, KNPP, UNFPA, 2005.

BPKP, ***Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja***, 2004.

Debbie Budlender, Diane Elson, Guy Hewitt and Tanni Mukhopadhyay, ***Understanding Gender Responsive*** Budgets, 2002.

Department of Health & Human Services, Office of Inspectorate General, ***Practical Evaluation for Public Managers, Getting The Information You Need***, Office of Inspector General, 1994.

Modul Indikator Kinerja, Referensi untuk Menentukan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, 2006.

Modul Pengukuran Kinerja dan Analisis Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, 2008.

Haris, Anggaran Responsif Gender Dalam PMK 104/PMK.02/2010, Direktorat Sistem Penganggaran, Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bogor 2010

Nining I. Soesilo, Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik, Buku I Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002.

Nogel, Stuart S. ***Policy Analysis Methods***, Nova Science Publisher, Inc. New York, 1999.

Owen, John M. and Patricia J. Rogers, ***Program Evaluation***, Forms and Approaches-International Edition, SAGE Publications, London, 1999.

Panduan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan, Tim PUG Kementerian Keuangan, 2010.

Panduan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan, 2010.

Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan, Jakarta, 2008.

Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009.

Pedoman Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Pekerjaan Umum, Jakarta, 2009.

Regional Training of Trainers Workshop on Gender Responsive Budgeting, UNDP, Asian Institute of Management, Manila, Philippines, 12-15 July 2004.

Rinusu, Penyusunan Anggaran Responsif Gender Berbasis Kinerja Bagi Perencana Kementerian Hukum dan HAM, Juni 2009.

_____, Penyusunan Anggaran Responsif Gender Bagi Perencana di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, April 2010

_____, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Perencana di Lingkungan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Oktober 2010

Weimer, David L. and Aidan R. Vining, *Policy Analysis, Concepts and Practice*, Prentice Hall, New Jersey, 1998.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

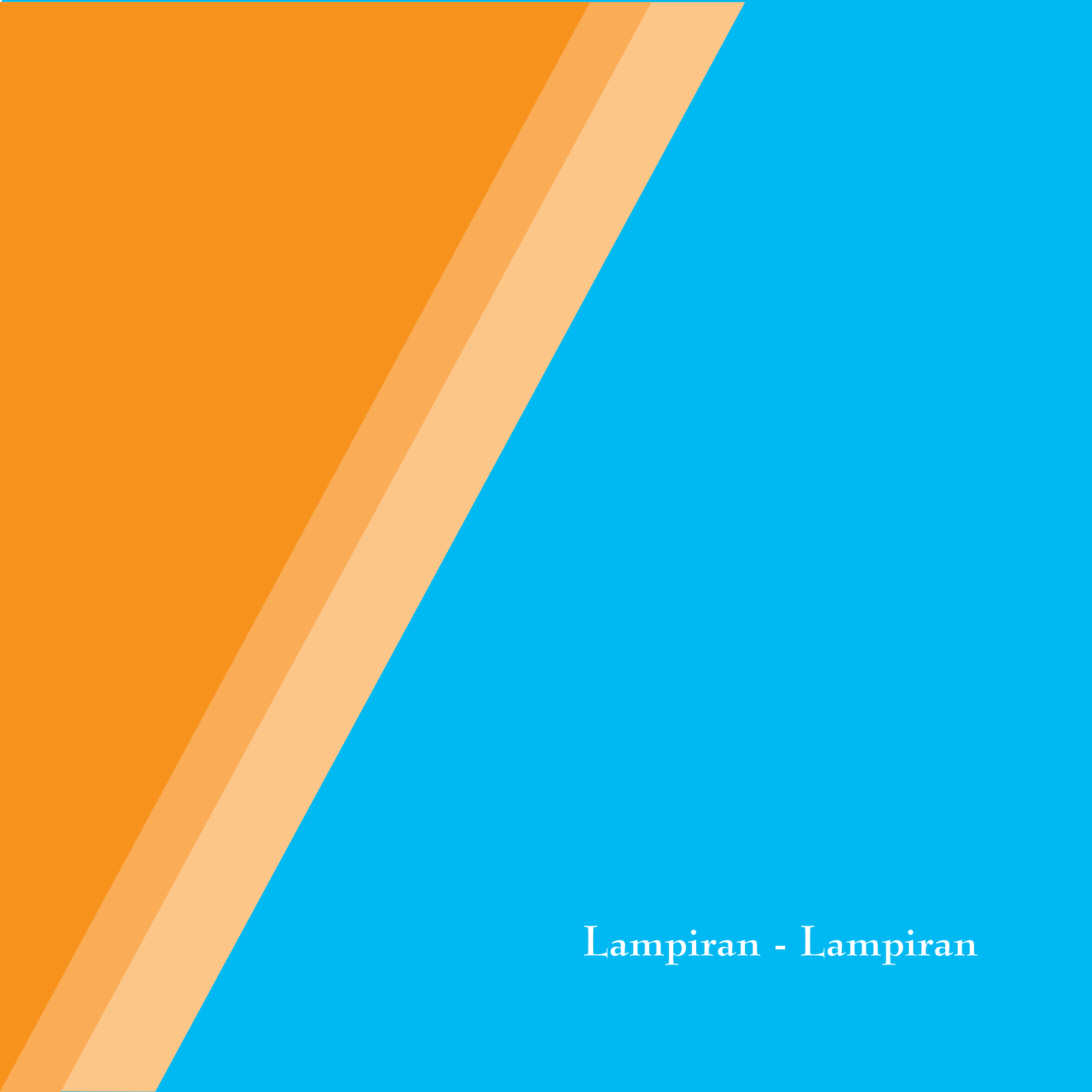
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian

negara/ lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2011

Kepmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.





Lampiran - Lampiran

LAMPIRAN 1

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)⁵ INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2010

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
Kebijakan/ program/ kegiatan	Data pembuka wawasan	Faktor Kesenjang an	Sebab Kesenjangan internal	Sebab Eksternal	Refor-mulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : Peningkatan Profesio nalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Penga wasan Kegiatan: Bimbingan Teknis Pemeriksaan Khusus atas Implementasi ARG Tujuan: Meningkatkan pemahaman pemeriksa tentang konsep gender, ARG dan audit penerapan ARG.	1. Pejabat Fungsional Pemeriksa sebanyak 14 laki laki dan 4 perempuan 2. Pejabat struktural sebanyak 21 orang yang terdiri dari 18 laki laki dan 3 perempuan. 3. Jumlah Tenaga pemeriksa yang belum mengetahui audit atas penerapan ARG.	Jumlah laki- laki dan perempuan pada Tenaga fungsional belum memahami tentang ARG Jumlah laki- laki dan perempuan pada Tenaga Struktural belum memahami tentang ARG Belum adanya informasi tentang ARG dan pelaksanaan Audit ARG dilingkungan Inspektorat	Belum ada sosialisasi dan internalisasi mengenai gender, PUG dan ARG Pejabat Struktural, fungsional, dan staf pemeriksa belum menganggap penting audit penerapan ARG Manfaat ARG Belum difahami oleh pejabat Struktural dan Fungsional	Tenaga dilingkungan SKPD masih belum memaha mi ARG sebagai bagian dari proses perencanaan dan pengang garan ARG belum diterap kan pada SKPD SKPD masih belum merasa perlu melaksa nakan ARG	Mening katkan pemahaman pejabat struktural dan fungsiona l tentang konsep gender, ARG serta audit penerapan ARG.	1. Identifikasi pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, dan staf teknis pemeriksa. 2. Koordinasi untuk pelaksa naan Bimtek: a) Pemben tukan panitia pelaksana b) Koordinasi dengan narasumber c) Penyusunan materi Bimtek d) Penyusunan dukungan administrasi penyele nggaraan 3. Bimtek ARG 4. Evaluasi hasil pelaksa naan Bimtek 5. Penyusunan Laporan	Jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa sebanyak 14 laki- laki dan 4 perem puan Jumlah Pejabat struktural sebanyak 21 orang yang terdiri dari 18 laki laki dan 3 perem puan Jumlah Tenaga pemerik sa belum mampu melakukan audit atas penerapan ARG.	Tersedianya tenaga struktural yang mampu memahami ARG bagi laki-laki dan perempuan Terwujudnya pema haman dan persepsi yang sama bagi 15 Orang Tenaga Struktural dan pemerik sa baik laki- laki maupun perempu an tentang penting nya Audit pelaksa naan ARG

⁷ Contoh GAP,GBS,TOR/KAK dan RKA merupakan hasil latihan kelompok pada pelatihan penyusunan teknis anggaran responsif gender tahun 2010 di Kalsel. (dimodifikasi)

LAMPIRAN 2
GENDER BUDGET STATEMENT (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

SKPD : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2011

Program	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Kegiatan	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Khusus atas Implementasi Anggaran Responsif Gender
Tujuan Kegiatan	Meningkatkan pemahaman pemeriksa tentang konsep gender, ARG dan audit penerapan ARG.
Indikator Kinerja Kegiatan	Terwujudnya pemahaman dan persepsi yang sama bagi 15 Orang tenaga struktural dan pemeriksa baik laki-laki maupun perempuan tentang pentingnya Audit pelaksanaan ARG.
Analisis Situasi	Inspektorat Provinsi Kalsel dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya didukung oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa sebanyak 14 laki laki dan 4 perempuan, Pejabat struktural sebanyak 21 orang yang terdiri dari 18 laki laki dan 3 perempuan, dan Tenaga pemeriksa Itprov Kalsel yang belum memahami untuk melakukan audit atas penerapan ARG. Dalam melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan selama ini belum memperhatikan atau menilai dari aspek keadilan dan kesetaraan gender. Hal disebabkan antara lain: Faktor Kesenjangan: • Jumlah laki-laki dan perempuan pada tenaga fungsional belum memahami tentang ARG • Jumlah laki-laki dan perempuan pada tenaga struktural belum memahami tentang ARG • Jumlah laki-laki dan perempuan pada tenaga pemeriksa belum memahami tentang ARG • Belum adanya informasi tentang ARG dilingkungan Inspektorat a. Penyebab Internal Kesenjangan Gender. • Belum tersedia wahana sosialisasi dan internalisasi mengenai gender, PUG, dan ARG. • Pejabat struktural dan fungsional dan staf pemeriksa belum memiliki kemampuan untuk menerapkan ARG • Mamfaat ARG Belum difahami bagi pejabat struktural dan fungsional b. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender. • Tenaga dilingkungan SKPD masih belum memahami ARG sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran daerah • ARG belum diterapkan pada SKPD • SKPD masih belum merasa perlu melaksanakan ARG • Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pemahaman pejabat struktural dan fungsional tentang konsep gender, ARG serta audit penerapan gender

Rencana aksi (langkah 7 GAP yang dirinci menjadi subkegiatan/tahapan kegiatan)	Subkegiatan	Subkegiatan 1	Identifikasi pejabat struktural, pejabat fungsional auditor dan staf teknis pemeriksa.
		Subkegiatan 2	Koordinasi/persiapan pelaksanaan Bimtek : a).Pembentukan panitia pelaksana b) Koordinasi dengan narasumber c) Penyusunan materi Bimtek d) Penyusunan dukungan administrasi penyelenggaraan
		Subkegiatan 3	Bimtek ARG
		Subkegiatan 4	Evaluasi hasil pelaksanaan Bimtek
		Subkegiatan 5	Penyusunan Laporan
		Output ²	Tersedianya tenaga struktural yang mampu memahami ARG dan memiliki persepsi yang sama bagi 15 Orang tenaga struktural, pemeriksa baik laki-laki maupun perempuan tentang pentingnya audit ARG.
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	Rp.31.190.000	
	SDM	SDM Panitia 4 Orang SDM Peserta 15 Orang	
	Peralatan dan Mesin	-	
Dampak/ Hasil Output kegiatan	Tenaga struktural dan tenaga pemeriksa baik laki-laki maupun perempuan mampu melakukan audit dan pembinaan penerapan ARG pada obyek pemeriksaan di SKPD.		

⁸ Output yang merupakan rumusan indikator output yang menunjukan barang dan atau jasa/pelayanan yang dihasilkan oleh kegiatan SKPD

LAMPIRAN 3

TERM OF REFERENCE/ KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR/KAK)

SKPD	: Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan
Program	: Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan	
Hasil	: Tenaga struktural dan tenaga pemeriksa mampu melakukan audit dan pembinaan yang responsif gender pada obyek pemeriksaan (SKPD Prov dan Kab/Kota)
Kegiatan	: Bimbingan Teknis Pemeriksaan Khusus Atas Implementasi Anggaran Responsif Gender
Indikator kinerja kegiatan	: Terwujudnya pemahaman dan persepsi yang sama bagi 15 Orang tenaga struktural dan pemeriksa baik laki-laki maupun perempuan mengenal audit pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender.
Satuan ukur dan jenis keluaran	: Jumlah tenaga mampu melakukan Audit yang responsif gender (ARG)
Volume	: 15 orang laki-laki dan perempuan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi

Landasan hukum pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Khusus atas Implementasi program dan kegiatan yang responsif gender mengacu kepada peraturan perundang-undangan yaitu antara lain : Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, RKPD Kalsel Tahun 2010 Nomor ... dan Renstra Inspektorat Prov. Tahun 2011 – 2015 Nomor ...

2. Gambaran Umum

Reformasi di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah memposisikan Inspektorat Provinsi sebagai Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) Daerah untuk dapat berfungsi sebagai *quality assurance*, *risk manajemen*, dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), disamping perannya dalam fungsi *controlling* sebagai bagian manajemen pemerintahan daerah. Dalam posisi yang demikian, dituntut para pejabat struktural dan fungsional

memiliki sumber daya dan kapasitas yang handal untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehubungan hal tersebut, Inspektorat dituntut mampu mendorong dilaksanakannya program-program pembangunan yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan. Terkait hal tersebut, disadari bahwa perencanaan program pada SKPD di Kalimantan Selatan belum berbasis Anggaran Responsif Gender, yang disebabkan belum dipahaminya konsep PUG dan manfaat ARG.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang konsep PUG dan penerapan ARG, maka pada Tahun 2011 Inspektorat akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Khusus atas Implementasi Anggaran Responsif Gender dengan sasaran para pejabat struktural dan fungsional pemeriksa sebanyak 15 orang dari pegawai laki-laki dan perempuan.

B. Penerima Manfaat

Bimbingan Teknis Pemeriksaan Khusus atas Implementasi Anggaran Responsif Gender dengan sasaran para pejabat struktural dan fungsional pemeriksa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pejabat struktural dan fungsional terhadap manfaat ARG dan meningkatkan kemampuan teknis pemeriksa tentang audit pelaksanaan ARG. Secara khusus penerima manfaat dari kegiatan bimbingan teknis ini, adalah :

- Langsung : para pejabat struktural dan fungsional pemeriksa Inspektorat Provinsi Kalimantan selatan, sebanyak 15 orang.
- Tidak langsung : Objek pemeriksaan (SKPD) yang dilakukan pemeriksaan khusus penerapan ARG sebanyak 44 SKPD.

C. Strategi Pencapaian Output

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Bimbingan teknis ini dilakukan metode pembelajaran otang dewasa dengan melibatkan partisipatif aktif laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No.	Tahapan	2011							
		Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
A.	Persiapan								
	1.Melakukan Identifikasi pejabat struktural, pejabat fungsional auditor dan staf teknis pemeriksa								
	2.Koordinasi/persiapan pelaksanaan Bimtek : a) Pembentukan panitia pelaksana b) Koordinasi dengan narasumber c) Penyusunan materi Bimtek d) Penyusunan dukungan administrasi penyelenggaraan								
B.	Pelaksanaan Pelatihan								
	1. Teori								
	2. Diskusi								
	3. Praktek								
C.	Pasca Pelatihan								
	1. Pemantauan								
	2. Evaluasi								
	3. Pelaporan								

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Khusus Anggaran Responsif Gender di rencanakan selama 3 (tiga) bulan tahun 2011

E. Biaya Yang Diperlukan

Kegiatan ini akan membutuhkan biaya yang bersumber dari APBD sebesar Rp.31.190.000,- (Tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh ribu) yang disediakan melalui DPA SKPD Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011.

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab

.....

LAMPIRAN 4

CONTOH APLIKASI GAP DAN GBS DALAM RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2011

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)		Formulir RKA – SKPD
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib	
Organisasi	: Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan – Subbag Umum dan Kepegawaian	
Program	: Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
Kegiatan	: Bimbingan Teknis Pemeriksaan Khusus atas Implementasi Anggaran Responsif Gender	
Lokasi Kegiatan	: Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan	
Jumlah Tahun n –1	: RP -	
Jumlah Tahun n	: Rp. 31.190.000	
Jumlah Tahun n+1	: Rp.125.000.000	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Pejabat Struktural dan Fungsional pemeriksa	15 orang
Input (Masukan)	Jumlah dana yang di butuhkan	Rp. 31.190.000
Output (Keluaran)	Tersedianya tenaga struktural yang mampu memahami ARG dan memiliki persepsi yang sama bagi 15 Orang tenaga struktural, pemeriksa baik laki-laki maupun perempuan tentang pentingnya Audit ARG.	15 orang terdiri laki-laki dan perempuan
Outcomes (Hasil)	Tenaga struktural dan tenaga pemeriksa baik laki-laki maupun perempuan mampu melakukan audit dan pembinaan penerapan ARG pada obyek pemeriksaan di SKPD.	95 %

LAMPIRAN 5

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)⁶ PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
Kebijakan/ program/ kegiatan	Data pembuka wawasan	Faktor Kesenjang- an	Sebab Kesenjangan internal	Sebab Eksternal	Refor-mulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : Pendidikan Non Formal dan Informal/ Pendidikan Kemasyarakatan Kegiatan: Pendidikan Kemasyarakatan Tujuan: Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani di bidang peternakan dan meningkatkan nilai tambah usaha ternak melalui substitusi jenis usaha (terpadu)	Tenaga kerja yang terserap di sub sektor peternakan 1.107.307 (2008), 1.143.574 (2009);	Rata-rata tingkat pendidikan petani ternak perempuan yang rendah dibandingkan petani ternak laki-laki	Tenaga ahli ataupun SDM peternakan yang terbatas Keterbatasan peralatan yang digunakan	Adanya stereotipe gender pada pola pendidikan di masyarakat yang lebih mengutamakan laki-laki Kemiskinan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di bidang peternakan bagi petani ternak Terdapat pola kepemilikan dan pembagian kerja yang dianggap bidang peternakan urusan laki-laki	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Petani ternak perempuan dan laki-laki agar memiliki kompetensi, keterampilan dalam pengelolaan usaha dan pemanfaatan hasil limbah ternak	Pelatihan Teknologi Pakan Ternak dan Pengelolaan Pabrik Pakan Mini Pelatihan Manajemen Sapi Perah Pengolahan Hasil Peternakan, Juru Sembelih Halal dan Peningkatan mutu Hasil Ternak	Jumlah SDM di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terbatas Jumlah pengelola ternak perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Pengelola Program Peternakan belum dipahami limbah pertanian yang dihasilkan cukup besar. Rendahnya kualitas pakan ternak	Meningkatkan peran perempuan dalam pengolahan limbah pertanian sebagai pakan ternak ruminansia melalui teknologi tepat guna. Meningkatnya produktivitas ternak: produksi susu harian lebih 8 lt/hr dan calving interval kurang dari 15 bulan Pangan asal hewan (PAH) dan bahan asal hewan (BAH) yang beredar di masyarakat berkualitas
	Jumlah SDM Pengelola Program Peternakan yang trampil di bidang peternakan (perempuan : laki-laki);	Akses SDM pengelola ternak perempuan dan laki-laki dalam kegiatan terbatas	Keterbatasan dana untuk bantuan petani ternak Keterbatasan data tentang sebaran limbah hasil pertanian	Daerah binaan yang jauh dan sulit dijangkau menyulitkan petugas perempuan untuk melakukan pendampingan Banyak limbah pertanian yang dibuang atau dimanfaatkan secara tradisional;				
	Jumlah petani ternak (perempuan : laki-laki);	Partisi petani ternak perempuan dan laki-laki dalam pelatihan kurang	Keterbatasan data tentang sebaran limbah hasil pertanian	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan teknologi pengolahan limbah pertanian sebagai pakan ternak				
	Pola Pembagian Kerja petani ternak besar (perempuan : laki-laki). limbah pertanian yang dihasilkan cukup besar.	Partisi petani ternak perempuan dan laki-laki dalam kelompok petani ternak kurang;	Tenaga SDM peternakan yang terbatas Keterbatasan dana;					

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
Kebijakan/ program/ kegiatan	Data pembuka wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	Sebab Eksternal	Refor-mulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
	Rendahnya kualitas pakan ternak Rata-rata tingkat pendidikan petani ternak perempuan lebih rendah dibandingkan petani ternak laki-laki Partisipasi tani ternak perempuan dan laki-laki dlm pelatihan	Partisi pasi perempuan dalam usaha pe-man faatan limbah perta nian menjadi pakan dan pengola- han pabrik pakan mini belum opti- mal.	Daerah yang diawasi cukup luas yang meli- puti seluruh Kab/Kota Jumlah SDM di Dinas Peterna kan dan Kesehat an Hewan yang terba- tas Pengelola Program Peterna kan belum dipa- hami	Akses dari produ sen ke kon sumen masih sulit ter- jangkau Rendahnya pengeta huan peternak dalam pembua- tan pakan yang murah Pemanfaatan limbah peterna kan yang belum optimal, Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan kelestarian lingkungan Penge tahuan dan pendidi- kan peternak yang masih rendah. Pengelolaan usaha tani be- lum terinte grasi khususnya bagi kelompok wanita tani		Penumbu- han Agribis- nis Paternak an Bagi Petani Ter- nak Perem- puam dan Laki-laki Pelatihan Usaha Ter- nak Terin- tegrasi Pelatihan Juru Peterna kan Pendidi kan Kemasya ra- katan ternak kambing	Rata-rata tingkat pen- didikan petani ternak perempuan lebih rendah dibanding- kan petani ternak laki- laki Partisipasi petani ter- nak perem- puan dan laki-laki dlm pelatihan	Peremp an dapat ber- peran dalam pemasaran pupuk hasil pengolahan limbah dan memanfaat- kan biogas sebagai sum- ber energi alternatif Meningkatnya kesejahteraan keluarga pe- tani peternak laki-laki dan perempuan.

⁹ Contoh GAP, GBS dan RKA merupakan hasil latihan kelompok pada pelatihan penyusunan anggaran responsif gender tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah (dimodifikasi)

LAMPIRAN 6

CONTOH 2. GENDER BUDGET STATEMENT (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA
TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2011

Program	Pendidikan Non Formal dan Informal
Kegiatan	Pendidikan Kemasyarakatan
Tujuan Kegiatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani di bidang peternakan dan meningkatkan nilai tambah usaha ternak melalui subsidi jenis usaha terpadu
Indikator kinerja kegiatan	terwujudnya 515 SDM petani ternak yang meningkat pemahaman dan keterampilannya untuk meningkatkan nilai tambah usaha ternak melalui subsidi jenis usaha (terpadu)
Analisis Situasi	- Tenaga kerja yang terserap di sub sektor peternakan 1.107.307 (2008), 1.143.574 (2009). - Hasil sampingan/ limbah pertanian yang dihasilkan cukup besar. - Rendahnya produktivitas ternak: produksi susu harian 6-8 lt/hari dan calving interval lebih dari 15 bulan. - Rendahnya kualitas pangan asal hewan (PAH) dan bahan asal hewan (BAH) yang beredar di masyarakat. - Limbah yang berasal dari ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk maupun sumber energi alternative. - Peningkatan nilai jual dengan melakukan pengolahan usaha berdasarkan sistem usaha agribisnis hulu, on farm dan hilir. - Jumlah peserta perempuan lebih banyak pada pelatihan keterampilan aneka usaha tani dan pelatihan penumbuhan agribisnis peternakan. - Kurangnya tenaga paramedis di lapangan - Rendahnya kualitas ternak kambing dan domba Dari data tersebut diatas dapat dilihat kesenjangannya yaitu - Rata-rata tingkat pendidikan pekerja perempuan yang rendah dibandingkan pekerja laki-laki. - Partisipasi perempuan dalam usaha pemanfaatan limbah pertanian menjadi pakan dan pengolahan pabrik pakan mini belum optimal. - Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan usaha peternakan sapi perah umumnya dilakukan oleh laki-laki. 1) Akses perempuan untuk menjadi juru sembelih di RPH atau RPU masih sangat kecil; 2) Minat perempuan untuk pengolahan pasca panen yang mengacu pada bahan pangan yang higienis masih kurang. - Peran perempuan dalam pemanfaatan limbah peternakan masih belum optimal. - Peranserta perempuan dalam pengolahan usaha agribisnis ternak masih kurang bertolak belakang dengan peran laki-laki. - Ketrampilan aneka usaha tani dan agribisnis pertanian lebih banyak diminati oleh laki-laki dari pada perempuan. Hal tersebut dipengaruhi faktor internal, yaitu: - Jumlah SDM di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terbatas; - Daerah binaan yang sangat luas dan lokasinya terkadang sulit dijangkau - Koordinasi dengan Kab./Kota sulit (keterbatasan anggaran) - Keterbatasan peralatan yang digunakan. - Keterbatasan data tentang sebaran limbah hasil pertanian di Jawa Tengah

	Faktor lain yang mengakibatkan kesenjangan tersebut adalah faktor eksternal, yaitu: • Adanya stereotipe gender pada pola pendidikan di masyarakat yang lebih mengutamakan laki-laki. • Kemiskinan dan kurangnya kesadaran akan arti pentingnya pendidikan • Masih banyak limbah pertanian yang dibuang atau dimanfaatkan secara tradisional. • Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan teknologi pengolahan limbah pertanian sebagai pakan ternak; • Jauhnya akses dari produsen ke konsumen • Penerapan manajemen dan budidaya ternak yang masih kurang optimal baik oleh peternak laki-laki ataupun perempuan. • Pandangan masyarakat bahwa usaha peternakan sapi perah merupakan usaha sampingan yang tidak membutuhkan keahlian khusus; • Rata-rata tingkat pendidikan pekerja yang masih rendah. • Perbedaan yang sangat mencolok antara mutu bahan pangan asal hewan yang tersedia dengan standar baku yang ditetapkan. • Bahan pangan asal hewan yang mudah mengalami kerusakan akibat dari cemaran mikroba dan bahan lainnya. • Pemanfaatan limbah peternakan yang belum optimal, sebagai sumber pendapatan dan sumber energi. • Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan kelestarian lingkungan. • Pengetahuan dan pendidikan peternak yang masih rendah. • Bahan asal hewan yang mudah rusak karena faktor penyimpanan, maka diperlukan usaha-usaha pengolahan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan nilai jualnya. • Keterampilan, minat dan waktu yang dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan berbeda-beda. • Permasalahan permodalan dan pemasaran hasil ternak bagi wanita tani • Tidak semua jenis pelatihan diminati secara merata baik oleh laki-laki ataupun perempuan. • Pengelolaan kesehatan ternak yang masih kurang. • Rendahnya kualitas pejantan kambing/domba di lapangan. Berdasarkan serangkaian permasalahan tersebut, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petani ternak perempuan dan laki-laki, agar memiliki kompetensi, keterampilan dalam pengelolaan usaha dan pemanfaatan hasil limbah ternak	
Rencana Tindak	Sub Kegiatan 1	Pelatihan Teknologi Pakan Ternak dan Pengelolaan Pabrik Pakan Mini
		Aktivitas 1 Identifikasi peserta
		Aktivitas 2 Penyiapan kurikulum
		Aktivitas 3 Pembelian bahan dan alat
		Aktivitas 4 Pengiriman surat undangan pelatihan (dengan harapan distribusi 80 % perempuan dan 20 % laki-laki)
		Aktivitas 5 Pelatihan/kursus
		Aktivitas 6 Evaluasi pelatihan
		Aktivitas 7 Evaluasi dampak pelatihan di kab./kota
		Sumber daya (Inputs) Dana: Rp. 107.210.000 (teknologi pakan ternak) dan Rp. 60.405.000 (pabrik pakan mini)
		SDM (panitia/staf yang terlibat) 15 orang
		Mesin Pelet 3 unit, Pres UMB 5 unit,
	Output /Suboutput 1	Terlaksananya kursus/pelatihan Teknologi Pakan Ternak dan Peningkatan Mutu Hasil Pertanian

Rencana Tindak	Sub Kegiatan 2	Pelatihan Managemen Sapi Perah	
		Aktivitas 1	Identifikasi peserta pada tingkat kab./kota
		Aktivitas 2	Penyiapan kurikulum
		Aktivitas 3	Pembelian bahan dan alat utk kepentingan pelatihan
		Aktivitas 4	Pengiriman surat undangan kursus/pelatihan (80 % perempuan dan 20 % laki-laki)
		Aktivitas 5	Pelaksanaan kursus/pelatihan
		Aktivitas 6	Evaluasi hasil pelaksanaan kursus dan pelatihan
		Aktivitas 7	Evaluasi dampak pelatihan di kab./kota
		Sumber daya (Inputs)	Dana: Rp. 100.510.000
			SDM: 15 orang (panitia/staf yang terlibat)
			Peralatan & Mesin: cooper 1 unit dan kandang jepit 6 unit.
		Output /Suboutput 2	15 orang memahami Managemen Sapi Perah
Rencana Tindak	Sub Kegiatan 3	Pengolahan Hasil Peternakan, Juru Sembelih Halal dan Peningkatan mutu Hasil Ternak	
		Aktivitas 1	Identifikasi peserta pada tingkat kab./kota
		Aktivitas 2	Penyiapan kurikulum
		Aktivitas 3	Pembelian bahan dan alat
		Aktivitas 4	Pengiriman surat undangan kursus/pelatihan
		Aktivitas 5	Pelaksanaan kursus/pelatihan
		Aktivitas 6	Evaluasi hasil pelaksanaan kursus dan pelatihan
		Aktivitas 7	Evaluasi dampak pelatihan di kab./kota
		Sumber daya (Inputs)	Dana: Rp. 61.705.000 (Pengolahan Hasil Peternakan), Rp. 72.205.000 (Juru sembelih halal) dan Rp. 60.405.000 (Peningkatan Mutu Hasil)
			SDM: 45 orang (panitia/staf yang terlibat)
			Peralatan & Mesin : Pengolahan hasil 1Unit dan peralatan penyembelih 1 unit
		Output /Suboutput 3	45 orang laki-laki dan perempuan memiliki pemahaman dan keterampilan dalam Pengolahan Hasil Peternakan, Juru Sembelih Halal dan Mutu Hasil Ternak.

Rencana Tindak	Sub Kegiatan 4	Pengolahan Limbah dan Pengolahan Pupuk Organik Bagi Wanita Tani	
		Aktivitas 1	Identifikasi peserta pada tingkat kab./kota
		Aktivitas 2	Penyiapan kurikulum
		Aktivitas 3	Pembelian bahan dan alat
		Aktivitas 4	Pengiriman surat undangan kursus/pelatihan pada Wanita Tani
		Aktivitas 5	Pelaksanaan kursus/pelatihan
		Aktivitas 6	Evaluasi pelaksanaan kursus dan pelatihan
		Aktivitas 7	Evaluasi dampak pelatihan di kab./kota
		Sumber daya (Inputs)	Dana: Rp. 60.205.000 (Pengolahan Limbah Ternak) dan Rp. 164.410.000 (Pengolahan Pupuk Organik Bagi Wanita Tani)
			SDM (panitia/staf yang terlibat) 45 Orang
			Peralatan & Mesin: digester 1 unit, pengolahan pupuk 1 unit dan mesin granul 2 unit
		Output /Suboutput 4	45 orang wanita Tani memahami Pengolahan Limbah dan Pengolahan Pupuk Organik
Rencana Tindak	Sub Kegiatan 5	Penumbuhan Agribisnis Paternakan Bagi Petani Ternak	
		Aktivitas 1	Identifikasi peserta
		Aktivitas 2	Penyiapan kurikulum
		Aktivitas 3	Pembelian bahan dan alat
		Aktivitas 4	Pengiriman surat undangan kursus/pelatihan (dengan harapan distribusi 80 % perempuan dan 20 % laki-laki)
		Aktivitas 5	Pelatihan/kursus
		Aktivitas 6	Evaluasi pelatihan
		Aktivitas 7	Evaluasi dampak pelatihan
		Sumber daya (Inputs)	Dana: Rp. 188.915.000
			SDM 45 orang (panitia/staf yang terlibat)
			Peralatan & Mesin: Digester 1 unit dan Pengolahan pupuk 1 unit
		Output /Suboutput 5	Penumbuhan Agribisnis Paternakan bagi 45 petani ternak (laki-laki dan perempuan)

Rencana Tindak	Sub Kegiatan 6	Pelatihan Usaha Ternak Terintegrasi	
		Aktivitas 1	Identifikasi peserta
		Aktivitas 2	Penyiapan kurikulum
		Aktivitas 3	Pembelian bahan dan alat
		Aktivitas 4	Pengiriman surat undangan
		Aktivitas 5	Pelatihan/kursus
		Aktivitas 6	Evaluasi pelatihan
		Aktivitas 7	Evaluasi dampak pelatihan
		Sumber daya (Inputs)	Dana: Rp. 206.195.000
			SDM: 15 orang (panitia/staf yang terlibat)
			Peralatan & Mesin: Kandang 3 unit, Pengolahan pupuk 1 unit, penetasan 3 unit dan pengolahan pakan 3 unit
		Output /Suboutput 5	Terintegrasinya usaha ternak bagi 15 orang petani ternak laki-laki dan perempuan
Rencana Tindak	Sub Kegiatan 7	Pelatihan Juru Peternakan	
		Aktivitas 1	Identifikasi peserta
		Aktivitas 2	Penyiapan kurikulum
		Aktivitas 3	Pembelian bahan dan alat
		Aktivitas 4	Pengiriman surat undangan kursus/pelatihan
		Aktivitas 5	Pelatihan/kursus
		Aktivitas 6	Evaluasi pelatihan
		Aktivitas 7	Evaluasi dampak pelatihan
		Sumber daya (Inputs)	Dana: Rp. 901.000.000
			SDM: 30 orang (panitia/staf yang terlibat)
			Peralatan & Mesin: Kandang jepit 6 unit, kandang 3 unit, pengolahan pakan 1 unit, pengolahan limbah 1 unit, Kesehatan ternak 1 unit Digester 1 unit dan Pengolahan pupuk 1 unit
		Output /Suboutput 5	Juru Peternakan memahami tatacara teknis peternakan

Rencana Tindak	Kegiatan / Sub Kegiatan 8	Pendidikan Kemasyarakatan untuk ternak kambing	
		Tujuan	Peningkatan produktivitas ternak kambing
		Aktivitas 1	Identifikasi peserta pada tingkat kab./kota
		Aktivitas 2	Penyiapan kurikulum
		Aktivitas 3	Pembelian bahan dan alat
		Aktivitas 4	Pengiriman surat undangan kursus/pelatihan
		Aktivitas 5	Pelatihan/kursus
		Aktivitas 6	Evaluasi pelatihan
		Aktivitas 7	Evaluasi dampak pelatihan
		Sumber daya (Inputs)	Dana: Rp. 118.160.000
			SDM: 15 orang (panitia/staf yang terlibat)
			Peralatan & Mesin: peralatan untuk kambing 30 unit
		Output /Suboutput 5	15 orang memahami teknis tatacara Penumbuhan Agribisnis Paternakan
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	Rp. 2.573.375.000	
	SDM	Panitia, Peserta, Narasumber, Fasilitator, Staf Pendukung), Peserta 515 orang, panitia,staf,dan fasilitator 20 orang	
	Peralatan dan Mesin	-	
Dampak/ Hasil/ Manfaat	1.Meningkatkan peran ♀ dalam pengolahan limbah pertanian sebagai pakan ternak ruminansia melalui teknologi tepat guna. 2.Meningkatnya produktivitas ternak: produksi susu harian lebih 8 lt/hr dan calving interval kurang dari 15 bulan 3.Pangan asal hewan (PAH) dan bahan asal hewan (BAH) yang beredar di masyarakat berkualitas. 4.Perempuan dapat berperan dalam pemasaran pupuk hasil pengolahan limbah dan memanfaatkan biogas sebagai sumber energi alternatif 5. Meningkatnya kesejahteraan keluarga petani peternak laki-laki dan perempuan.		

Sumber: Hasil Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender Tahun 2010 di Semarang, Jawa Tengah (dimodifikasi)

LAMPIRAN 7

CONTOH APLIKASI GAP DAN GBS DALAM RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2011

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)		Formulir RKA – SKPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pilihan	
Organisasi	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Program	: Pendidikan Non Formal dan Informal	
Kegiatan	: Pendidikan Kemasyarakatan	
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	
Jumlah Tahun n –1	: RP 2.389.880.000	
Jumlah Tahun n	: Rp. 2.233.472.000	
Jumlah Tahun n+1	: Rp.2.573.375.000	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Kualitas SDM Bidang Peternakan	515 orang
Input (Masukan)	Jumlah dana yang di butuhkan	Rp.2.573.375.000
Output (Keluaran)	Kelompok tani memahami dan memiliki keterampilan dalam pengelolaan teknologi, pakan,limbah peternakan,manajemen sapi perah dan pabrik pakan mini, agribisnis peternakan,pupuk organik dan pengolahan hasil produksi peternakan.	515 orang Laki-laki dan Perempuan (kelompok tani wanita)
Outcomes (Hasil)	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan teknis (kualitas SDM petani ternak) dalam pengelolaan, pemanfaatan hasil produksi peternakan	100 %

LAMPIRAN 8

CONTOH 1: PERUMUSAN OUTPUT KEGIATAN

No	Kegiatan	Output
1	Pelatihan	Jumlah orang yang trampil tentang ...
2	Sosialisasi	Jumlah orang yang paham tentang ...
3	Rapat (Koordinasi)	Dokumen rencana kerja dan tindak lanjut bidang ... untuk tiap peserta rapat yang relevan, operasional dan disepakati bersama
4	Pembangunan	Luas... yang dibangun
5	Studi/Penelitian	Jumlah dokumen hasil studi/penelitian yang minimal berisi ...
6	Pengadaan barang	Jumlah dan spesifikasi ... barang yang dibeli
7	Pemeliharaan	Jumlah dan spesifikasi ... yang terpelihara
8	Pemantauan	Jumlah dokumen hasil pemantauan yang minimal berisi ...

CONTOH 2: DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN: PEKERJA ANAK USIA 10-14 TAHUN MENURUT DAERAH TEMPAT TINGGAL DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2007 – 2008

Daerah Tempat Tinggal dan Tahun	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
Perkotaan		
2007	2,27	2,48
2008	1,98	2,39
Pedesaan		
2007	7,97	5,04
2008	7,06	4,27

BPS,2009

CONTOH 3: DATA DASAR: INDEKS PEMBANGUNAN GENDER MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2007-2008

Kabupaten/Kota	Tahun	
	2007	2008
Pandeglang	58,73	59,50
Lebak	58,81	59,58
Tangerang	60,16	60,59
Serang	55,63	55,82
Kota Tangerang	65,87	66,79
Kota Cilegon	56,60	57,41
Kota Serang	-	59,28
Banten	61,40	61,49

Sumber: KPPPA, 2009

CONTOH 4: DATA TERPILAH MENURUT WAKTU: ANGKA MELEK HURUF MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2007 – 2008

Kelompok Umur	Tahun	
	2007	2008
Perkotaan		
15-19	98,96	99,60
20-24	98,70	99,30
25-34	97,88	98,67
35-49	92,73	95,11
40+	78.03	75,73
15+	91,87	92,19

BPS,2009

LAMPIRAN 9

CONTOH TOLOK UKUR KINERJA RESPONSIF GENDER URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN MENURUT SKPD

Kode Ur;usan	Fungsi dan Urusan	SKPD	Tolok Ukur Kinerja Responsif Gender
1	Pemerintahan Umum	DPRD, KDH&WKDH, SetDa, Sekretariat DPRD (Setwan), BPKD, Balitbang dan Bawasda	• Tingkat kapasitas aparatur untuk laki-laki dan perempuan • Tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi daerah • Tingkat kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk laki-laki dan perempuan • Tingkat profesionalisme dan kompetensi staff laki-laki dan perempuan • Jumlah kasus penyalahgunaan wewenang dari laki-laki dan perempuan
1	Kepegawaian	Badiklat, BKD	• Tingkat kapasitas sumber daya aparatur laki-laki dan perempuan • Tingkat keterampilan dan aparatur • Tingkat profesionalisme aparatur
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	• Tingkat pengangguran terbuka untuk laki-laki dan perempuan • Jumlah pekerja formal perdesaan/perkotaan untuk laki-laki dan perempuan • Jumlah pekerja pada lapangan kerja kurang produktif untuk laki-laki dan perempuan • Jumlah kasus pelanggaran/penyimpangan regulasi ketenagakerjaan
1	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UKM	• Tingkat kepastian usaha dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha laki-laki dan perempuan • Tingkat keterampilan SDM Usaha Mikro untuk laki-laki dan perempuan • Akses ke permodalan pasar untuk laki-laki dan perempuan • Kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha kecil untuk laki-laki dan perempuan
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	• Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan • Tingkat perkembangan lembaga ekonomi perdesaan • Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa • Tingkat kapasitas aparatur pemerintahan desa • Tingkat kontribusi perempuan dalam pembangunan perdesaan

Kode Ur;usan	Fungsi dan Urusan	SKPD	Tolok Ukur Kinerja Responsif Gender
2	Pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB - Kualitas SDM pertanian di perdesaan untuk laki-laki dan perempuan - Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan bagi laki-laki dan perempuan - Tingkat ketahanan pangan kelompok miskin - Kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai - Cakupan sistem penyuluhan - Tingkat penggunaan teknologi tepat guna - Nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan - Tingkat infrastruktur perdesaan
2	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	- Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB - Tingkat perkembangan budidaya perikanan - Tingkat perkembangan perikanan tangkap - Ketersediaan sistem penyuluhan perikanan - Tingkat pengelolaan produksi perikanan - Tingkat pemasaran produksi perikanan - Tingkat perkembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar
2	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Dinas Pasar	- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB - Ketersediaan program perlindungan konsumen - Tingkat pertumbuhan nilai ekspor - Tingkat pertumbuhan nilai impor - Tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan ekspor-impor - Tingkat pertumbuhan realisasi omzet perdagangan per tahun - Ketersediaan sistem pembinaan pedagang sektor informal bagi pelaku usaha laki-laki dan perempuan
2	Perindustrian	Dinas Perindustrian	- Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB - Tingkat kapasitas iptek sistem Produksi - Tingkat penerapan standardisasi produk industri - Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah - Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri untuk laki-laki dan perempuan

Kode Ur;usan	Fungsi dan Urusan	SKPD	Tolok Ukur Kinerja Responsif Gender
2	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi	• Tingkat perkembangan areal transmigrasi • Jumlah transmigran yang berhasil dimukimkan • Akses transmigran kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan • Ketersediaan program penyuluhan bagi transmigrasi lokal/regional
1	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota, Dinas Cipta Karya	• Tingkat aksesibilitas wilayah • Tingkat mobilitas orang/barang • Tingkat kondisi prasarana transportasi • Tingkat resiko dan periode genangan banjir • Jumlah kejadian bencana kekeringan • Tingkat ketersediaan jaringan prasarana dan pengelolaan air baku • Tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan (rumah tangga, permukiman, pertanian, industri) • Tingkat pelayanan air minum bagi masyarakat • Tingkat pelayanan air limbah bagi masyarakat miskin • Tingkat pengendalian potensi konflik air • Tingkat pengendalian pemanfaatan air tanah • Tingkat perlindungan daerah pantai dari abrasi air laut • Tingkat kesiagaan penanganan bencana alam

Kode Ur;usan	Fungsi dan Urusan	SKPD	Tolok Ukur Kinerja Responsif Gender
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru, Rumah Sakit Kebergantungan Obat	• Umur harapan hidup • Angka kematian bayi • Angka kematian ibu melahirkan • Tingkat prevalensi/kejadian gizi kurang pada anak balita • Angka kasus anemia gizi besi pada ibu hamil • Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan • Tingkat pemerataan obat dan perbekalan kesehatan • Tingkat ketersediaan unit pelayanan kesehatan • Tingkat keterjangkauan pelayanan kesehatan • Jumlah kasus akibat pangan dan bahan berbahaya • Jumlah kasus/kejadian penyakit menular • Jumlah kasus penyakit malaria, DBD • Tingkat prevalensi HIV/AIDS • Persentase perilaku hidup sehat • Akses penduduk terhadap sanitasi dasar • Tingkat kunjungan penduduk miskin ke Puskesmas • Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin • Akses masyarakat kawasan perbatasan pada pelayanan kesehatan • Proporsi tenaga dokter di Puskesmas • Pemerataan tenaga kesehatan • Tingkat pelayanan kesehatan Ibu dan bayi* • Tingkat pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah* • Cakupan peserta KB aktif* • Cakupan pelayanan imunisasi* • Cakupan pelayanan kesehatan jiwa • Cakupan pelayanan gawat darurat • Tingkat pencegahan/pemberantasan penyakit polio, TB Paru • Jumlah institusi binaan untuk pelayanan kesehatan lingkungan

Kode Ur;usan	Fungsi dan Urusan	SKPD	Tolok Ukur Kinerja Responsif Gender
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kantor Perpustakaan Daerah	• Cakupan pelayanan pendidikan usia dini • Persentase penduduk yang selesai Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun • Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan menengah • Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi • Tingkat mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal/ non formal • Angka buta aksara penduduk usia ≥ 15 th • Persentase penduduk miskin menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun • Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan formal • Pemerataan pendidikan • Tingkat efektivitas manajemen berbasis sekolah • Jumlah anggaran pendidikan dari APBN/D • Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan • Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar 9 tahun* • Angka Putus Sekolah (APS) pada pendidikan sekolah* dasar/ sederajat • APS pada pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat* • APS pada pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat*

Kode Ur;usan	Fungsi dan Urusan	SKPD	Tolok Ukur Kinerja Responsif Gender
1	Pemberdayaan Perempuan	Dinas/Biro/Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Jumlah kebijakan daerah untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan - Tingkat kesenjangan antara HDI dan GDI - Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan - Akses perempuan terhadap pendidikan - Persentase penduduk perempuan berusia 10 th ke atas yang tidak/belum pernah sekolah - Persentase penduduk perempuan yang buta huruf - Akses perempuan terhadap layanan kesehatan. - Akses perempuan untuk terlibat dalam kegiatan publik - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan - Tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif - Persentase perempuan dalam jabatan publik (PNS) - Jumlah (persentase) pekerja anak - Tingkat perlindungan perempuan
1	Keluarga Sejahtera	BKKBD	- Tingkat kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak - Tingkat/kualitas tumbuh kembang anak - Cakupan pelayanan pasangan usia subur yang tergolong masyarakat miskin
1	Sosial	Dinas Sosial	- Cakupan pembinaan gelandangan, pengemis, dan PMKS, anak jalanan, dan anak cacat - Akses kepada pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin - Jumlah tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan - Peluang mengakses pelayanan umum - Persentase penurunan jumlah fakir miskin dan keluarga rentan sosial

Sumber: LGSP Planning Team Tahun 2008. Keterangan: 1 Kode Urusan Wajib, 2 Kode Urusan Pilihan. Untuk pengembangan target kinerja dalam RKA dapat dirumuskan targetnya secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan

(Footnotes)

- 1 Indikator output yang menunjukkan barang dan atau jasa/pelayanan yang dihasilkan oleh kegiatan SKPD
- 2 Output yang merupakan rumusan indikator output yang menunjukkan barang dan atau jasa/pelayanan yang dihasilkan oleh kegiatan SKPD

